

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika sengketa Laut China Selatan sangat dipengaruhi oleh konstruksi identitas nasionalnya sebagai bangsa maritim Nusantara. Identitas ini tidak hanya membentuk cara pandang terhadap laut sebagai ruang pemersatu, tetapi juga menjadi dasar bagi sikap Indonesia yang cinta damai, netral, dan konsisten menjunjung hukum internasional. Identitas maritim tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan luar negeri, mulai dari retorika diplomatik, langkah-langkah hukum, tindakan simbolik seperti penamaan Laut Natuna Utara, hingga partisipasi aktif dalam forum regional maupun global. Dalam kerangka *National Role Conception* (NRC), Indonesia memaknai dirinya (ego) sebagai *honest broker* atau mediator yang netral dan berlandaskan UNCLOS 1982. Pandangan ini sejalan dengan ekspektasi pihak luar (alter), khususnya ASEAN dan mitra eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, yang menaruh harapan agar Indonesia mampu menjaga sentralitas kawasan serta menegakkan tatanan hukum internasional. Konvergensi antara ego dan alter ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN sekaligus *middle power* di Indo-Pasifik, yang dipercaya sebagai fasilitator stabilitas regional.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan dalam relasi ego–alter, terutama dengan China. Di satu sisi, Indonesia secara konsisten menolak klaim historis *nine-dash line* dan menegaskan UNCLOS 1982 sebagai satu-satunya dasar hukum sah. Di sisi lain, China berusaha mendorong Indonesia menerima narasi “overlapping maritime rights and interests” yang berpotensi melemahkan konsistensi peran Indonesia sebagai *rule-based honest broker*. Dilema ini menunjukkan bahwa strategi Indonesia kerap berada pada titik kompromi antara mempertahankan prinsip identitas Nusantara dengan mengelola hubungan bilateral strategis bersama China. Terlepas dari dilema tersebut, strategi Indonesia terbukti cukup efektif dalam menjaga kedaulatan nasional sekaligus stabilitas kawasan. Hal ini terlihat dari peningkatan patroli maritim di Natuna, pengiriman nota diplomatik ke PBB, keterlibatan aktif dalam negosiasi *Code of Conduct* (CoC), hingga kerja sama bilateral seperti delimitasi ZEE dengan Vietnam. Dengan mengombinasikan diplomasi hukum, pendekatan *soft power*, dan simbolisme identitas, Indonesia tidak hanya tampil sebagai aktor reaktif terhadap dinamika geopolitik, melainkan juga sebagai agen normatif yang konsisten menegakkan hukum internasional serta menjaga perdamaian dan keamanan kawasan Laut China Selatan.

4.2 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan sangat dipengaruhi oleh konstruksi identitas nasional serta interaksi antara persepsi internal dan ekspektasi eksternal. Oleh karena itu, ke depan

penting bagi strategi diplomasi Indonesia untuk tetap konsisten dengan identitas maritim Nusantara yang berlandaskan prinsip cinta damai, bebas-aktif, dan menjunjung tinggi hukum internasional. Konsistensi ini dapat diperkuat melalui penegasan posisi hukum berdasarkan UNCLOS 1982, keterlibatan yang lebih aktif dalam mekanisme multilateral, serta kewaspadaan terhadap narasi yang berpotensi melemahkan kedaulatan seperti *overlapping maritime rights and interests*. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjaga citra sebagai *honest broker* yang netral sekaligus memperkokoh perannya sebagai pemimpin regional.

Selain itu, upaya penguatan diplomasi maritim yang terintegrasi dengan aspek keamanan juga perlu menjadi perhatian agar strategi yang dijalankan tidak berhenti pada retorika, melainkan terimplementasi dalam langkah nyata yang mampu mencegah eskalasi militer. Pendekatan yang menggabungkan simbolisme identitas nasional dengan kesiapsiagaan pertahanan, seperti yang tercermin dalam tindakan simbolik maupun partisipasi dalam forum multilateral, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Dari sisi akademis, penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam menelaah faktor domestik seperti opini publik, peran media, dan dinamika elite politik yang turut memengaruhi konstruksi peran nasional Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menggali dimensi domestik tersebut secara lebih mendalam atau bahkan melakukan studi perbandingan dengan negara non-claimant lain seperti Singapura atau Thailand. Dengan demikian, kajian mengenai strategi diplomasi Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan akan semakin

komprehensif sekaligus memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan teori dan praktik hubungan internasional.